



JPALG

Journal of Public Administration and Local Governance

<http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadmini>



Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang

Amita Riani¹, Sri Suwitri², Yuni Kurniasih³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

¹amitariani@gmail.com, ²witkusdali@gmail.com, ³yunikurniasih@untidar.ac.id

Permalink/DOI: 10.31002/jpalg.v8i1.8620

Received: 13 Februari 2024 ; Accepted: 30 Maret 2024; Published: 31 Mei 2024

Abstrak

Program Kampung Iklim dilaksanakan dengan tujuan guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim, termasuk di dalamnya yaitu menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu desa yang telah mengimplementasikan ProKlim adalah Desa Sambak di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Maka, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan terkait Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Penelitian ini menggunakan desain metode kualitatif deskriptif, data penelitian diperoleh dari proses wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn serta Van Metter dan Van Horn dengan berfokus kepada aspek komunikasi dan sumber daya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung Iklim telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Pembentukan Tim Pokja ProKlim Desa Sambak merupakan langkah yang strategis dalam mengatasi tantangan perubahan iklim. Akan tetapi di Desa Sambak sendiri peranan tim ini masih belum maksimal, Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan program belum mencukupi kebutuhan, ketersediaan sumber daya finansial dan keterbatasan akses informasi menjadi kendala serius dalam mengembangkan program-program ProKlim.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Perubahan Iklim, Program Kampung Iklim

Abstract

Program Kampung Iklim is implemented with the aim of increasing community understanding of climate change and its impacts as well as fostering community independence in implementing climate change adaptation, including maintaining local wisdom values. One of the villages that has implemented ProKlim is Sambak Village in Kajoran District, Magelang Regency. Therefore, this research was conducted to determine the implementation of policies related to the Climate Village Program (ProKlim) in Sambak Village, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. This research uses a descriptive qualitative method design, research data is obtained from the interview process, observation, documentation and literature study. This research uses policy implementation theory according to Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn and Van Metter and Van Horn by focusing on aspects of communication and resources. The research results show that the Climate Village Program has been running well although there are still several obstacles in its implementation. The formation of the Sambak Village ProKlim Working Group Team is a strategic step in overcoming the challenges of climate change. However, in Sambak Village itself, the role of this team is still not optimal, the infrastructure needed for program development is not sufficient, the availability of financial resources and limited access to information are serious obstacles in developing ProKlim.

Keyword : Policy Implementation, Climate Change, Program Kampung Iklim

PENDAHULUAN

Administrasi publik dewasa ini bukan hanya didefinisikan secara sederhana sebagai suatu ilmu mengenai urusan negara, lebih dari itu administrasi publik membawa peranan yang sangat besar dalam setiap aspek baik dari lingkungan sosial, politik, hukum, hingga budaya yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dari lembaga negara. Kompleksnya kehidupan masyarakat suatu negara melalui pertumbuhan maupun dinamika yang terus terjadi, administrasi publik dituntut untuk dapat menjadi solusi dalam setiap permasalahan masyarakat. Salah satu dimensi administrasi publik yang ditujukan untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terus berkembang di masyarakat ialah melalui kebijakan publik.

Keberhasilan pemerintah dalam implementasi kebijakan dapat diukur dari proses awal perencanaan kegiatan hingga pencapaian tujuan akhir atau output yang ingin diraih. Hal ini sesuai dengan pendapat Meriee S. Grindle (1980), "Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai".

Permasalahan terkait perubahan iklim merupakan isu global yang menjadi urgensi setiap negara untuk turut serta berpartisipasi dalam aksi iklim. Suhu bumi diperkirakan akan meningkat antara 1,4 - 5,8^oC pada tahun 2100, dimana sejak akhir abad ke-19 suhu global bumi telah meningkat antara 0.6 – 2^oC. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia selama 19 tahun yaitu sejak

2001-2019 telah mengalami perubahan klimatologis yang menyebabkan adanya perbedaan durasi musim hujan. Lebih lanjut, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa per September 2020, suhu udara rata-rata Indonesia mengalami kenaikan ekstrem yang mencapai 27,2^oC. Kemudian pada tahun 2021 Indonesia mengalami tahun terpanas urutan ke-8 dengan nilai anomali sebesar 0,4^oC.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Melalui kewenangan tersebut maka disusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) berdasarkan Peraturan Presiden No.61 tahun 2011. RAN GRK kemudian menyusun transformasi strategi yaitu Program Kampung Iklim (ProKlim).

ProKlim dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan, sehingga seluruh pihak terdorong untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK.

Berdasarkan data kebencanaan BPBD tahun 2021, Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki tingkat kerentanan iklim dan bencana dengan resiko yang tinggi untuk segala jenis bencana. Adapun jumlah kejadian bencana yang paling sering terjadi diantaranya yaitu tanah longsor, angin kencang, kebakaran

rumah, kebakaran hutan, gempa, dan kekeringan.

Salah satu daerah yang rawan akan bencana ialah Desa Sambak di Kecamatan Kajoran yang merupakan desa di Kabupaten Magelang yang telah berhasil menerima penghargaan ProKlim Utama tahun 2017 dan ProKlim Lestari tahun 2021. Implementasi Program Kampung Iklim ini turut memberi andil dalam meningkatkan resiliensi perubahan iklim.

Implementasi Program Kampung Iklim di Desa Sambak, Kec. Kajoran, dilakukan dengan pendayagunaan sumber-sumber alam yang menjadi potensi lokal untuk dapat menjadi strategi peningkatan resiliensi perubahan iklim.

Desa Sambak sendiri memiliki potensi lokal yang sangat beragam dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga wisata. Pengelolaan potensi-potensi ini kemudian dibagi kedalam kelompok-kelompok kerja ProKlim sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Sambak Nomor: 188.4/9/KEP./2015/2020. Kelompok kerja ini memiliki tugas untuk merumuskan perencanaan pelaksanaan ProKlim di Desa Sambak, melaksanakan ProKlim di Desa Sambak, melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan ProKlim di Desa Sambak, dan melaporkan hasil pelaksanaan ProKlim.

Adapun pembagian kelompok ProKlim Desa Sambak ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu Koordinator Bidang Adaptasi Perubahan Iklim, Koordinator Bidang Mitigasi Perubahan Iklim dan Tim Smart ProKlim. Dimana didalamnya terdapat sub bagian yang lebih kecil yaitu seksi pertanian dan ketahanan pangan, seksi sanitasi dan kesehatan lingkungan, seksi ketahanan air, seksi penanggulangan bencana, seksi penghijauan dan agroforestry, seksi pengelolaan sampah dan limbah, dan seksi energi terbarukan.

Salah satu hambatan dalam implementasi Program Kampung Iklim di Desa Sambak ialah terkait komunikasi dan pengelolaan sumber daya desa. Dimana untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat perlu adanya perhatian khusus terutama karena adanya perbedaan paradigma masyarakat terkait kebijakan implementasi ProKlim itu sendiri. Perbedaan paradigma masyarakat ini mengacu kepada adanya perbedaan cara pandang, nilai, keyakinan, dan pola pikir yang dimiliki oleh setiap individu dalam kelompok masyarakat terkait kebijakan yang akan diimplementasikan.

Adapun tantangan lainnya ialah terkait dengan pengelolaan potensi sumber daya adalah adanya potensi yang sangat beragam sehingga perlu tindakan dan strategi pemanfaatan yang terintegrasi. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa diperlukan adanya analisis potensi, rencana pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat, hingga pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan dalam proses implementasi kebijakan sering terjadi kejenuhan masyarakat dalam menunggu hasil dari implementasi program yang tidak dapat diraih dalam waktu singkat.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Kampung Iklim yang sudah berjalan di Desa Sambak sejauh ini dan bagaimana dampak yang diperoleh dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melaksanakan pendekatan studi kasus dan menjelaskan terkait Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah bertujuan untuk mencari makna di balik fenomena maka dapat dilakukan pengkajian secara asosiatif (Sugiyono, 2017).

Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang dan dalam penelitian ini diukur menggunakan model implementasi kebijakan menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn serta Van Metter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2015:72).

Penelitian ini dilakukan di Desa Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Informan penelitian merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi terkait dengan topik penelitian, yaitu :

1. Kepala Desa 1 Orang
2. Ketua Tim Pokja ProKlim 1 Orang
3. Tim Smart ProKlim 1 Orang
4. Masyarakat 3 Orang

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah a. Observasi, b. Wawancara, c. Dokumentasi, d. Studi Literatur. Dimana analisis data dilakukan melalui proses pengorganisasian data, penjabaran kedalam unit-unit, melakukan sintesa, melakukan penyusunan dalam pola, pemilahan data penting, dan merumuskan kesimpulan. Teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menurut Miles dan Huberman (2014:14) yang mana analisis data dilakukan dalam tiga

langkah yaitu kondensasi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Kampung Iklim di Desa Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang

Implementasi Program Kampung Iklim telah dirancang untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, lembaga pemerintah desa, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Masing-masing pihak memiliki peran dan kontribusi yang berbeda dalam pelaksanaan program. Guna mendorong implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Sambak, pemerintah desa kemudian membentuk Tim Pokja ProKlim Desa Sambak untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan kegiatan.

Tim Pokja ProKlim Desa Sambak dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sambak Nomor: 188.4/9/KEP/2015/2020 tentang Kelompok Kerja Program Kampung Iklim Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2020. Tim Pokja ProKlim Desa Sambak bertugas untuk melakukan pengembangan potensi dengan mempertimbangkan kerentanan yang dialami masyarakat, kegiatan yang telah dilakukan masyarakat, potensi yang dimiliki, dan kebijakan lokal yang mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pembentukan Tim Pokja ProKlim Desa Sambak telah memenuhi syarat dengan adanya pengurus, struktur organisasi, rencana atau program kerja, aturan, dan sistem kaderisasi seperti yang tertuang dalam Lampiran 1 Pedoman Umum Program Kampung Iklim, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia No. 19 Tahun 2012 Tentang Program Kampung Iklim.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan, ditemukan bahwa pembentukan Tim Pokja ProKlim di Desa Sambak telah dilakukan dengan cara yang jelas dan terstruktur. Dimana setiap anggota Tim Pokja ProKlim Desa Sambak telah memiliki kualifikasi yang memadai terkait kemampuan, sesuai dengan bidang yang dipilih. Setiap kelompok dalam Tim Pokja ProKlim memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik untuk menghindari adanya tumpang tindih kewajiban.

Pendekatan kolaboratif yang kuat serta komitmen yang tinggi antara pemerintah desa, Tim Pokja ProKlim, dan masyarakat telah membawa dampak positif dalam pelaksanaan rencana kerja bersama mereka, yang berlangsung dalam periode 2022-2026. Keberhasilan langkah-langkah ini tercermin dalam pengakuan dan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Sebagai bukti penghargaan atas pencapaian Desa Sambak dalam menjalankan Program Kampung Iklim (ProKlim), Desa Sambak meraih predikat ProKlim Utama pada tahun 2017 dan ProKlim Lestari pada tahun 2021.

Meskipun implementasi Tim Pokja Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Sambak telah menunjukkan keberhasilan dalam banyak aspek, tidak dapat diabaikan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang menghambat kelancaran proses ini. Salah satu masalah yang dihadapi adalah terkait dengan ketersediaan waktu anggota tim yang menjadi

isu yang signifikan karena banyak dari mereka memiliki kesibukan individu seperti pekerjaan atau pendidikan. Hal ini dapat menghambat kehadiran dan partisipasi aktif dalam pertemuan dan kegiatan Tim Pokja ProKlim, yang pada gilirannya dapat memperlambat pelaksanaan program.

Kemudian, potensi konflik sosial juga merupakan kendala yang harus diatasi. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Sambak memiliki latar belakang yang beragam, dan perbedaan pendapat, paradigma atau ketidaksetujuan terhadap aspek-aspek tertentu dari ProKlim bisa mempengaruhi kerja sama dan konsensus dalam Tim Pokja.

2. Aspek Pendukung atau Penghambat dalam Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Di Desa Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang

Dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, terdapat sejumlah aspek yang mendukung dan menghambat implementasi program tersebut. Adapun aspek pendorong dan penghambat yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu terfokus kepada aspek komunikasi dan sumber daya berdasarkan kepada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dan teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn.

A. Komunikasi

Komunikasi yang efektif adalah fondasi dari kesuksesan sebuah kebijakan, karena melalui komunikasi yang baik, pemahaman bersama, dukungan, dan partisipasi masyarakat dapat tercapai. Hal ini didukung oleh pendapat Brian W. Hogwood yaitu bahwa komunikasi yang baik dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang tujuan

kebijakan, tanggung jawab masing-masing pihak, serta peran yang harus dimainkan oleh berbagai aktor dalam pelaksanaan kebijakan.

Model komunikasi linier merupakan model strategi komunikasi yang biasa digunakan oleh Tim Pokja ProKlim dimana model ini melibatkan pengirim, pesan, saluran komunikasi, penerima, dan umpan balik. Dalam implementasi kebijakan, pemerintah atau lembaga yang mengimplementasikan kebijakan adalah pengirim pesan, sedangkan masyarakat atau pemangku kepentingan lain adalah penerima. Pesan yang jelas dan komunikasi yang terbuka sangat penting untuk memastikan pemahaman yang baik tentang kebijakan yang diimplementasikan.

Tim Pokja ProKlim memegang peran sentral sebagai komunikator utama dalam menginformasikan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai Program Kampung Iklim (ProKlim). Pernyataan ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, dimana peran komunikator sangatlah vital.

Peran Tim Pokja ProKlim tidak hanya terbatas pada penyusunan program kegiatan, tetapi juga melibatkan tugas-tugas krusial dalam menjelaskan secara rinci tujuan, prioritas, serta langkah-langkah yang harus diambil dalam pelaksanaan kebijakan kepada para pelaksana dan pemangku kepentingan yang terlibat di lapangan, hingga berkaitan dengan proses pencapaian kerja sama dengan pihak-pihak lain di luar Desa Sambak guna mendorong pengembangan dan peningkatan inovasi desa.

Dalam proses komunikasi berkaitan dengan implementasi Program Kampung Iklim di Desa Sambak, beberapa hambatan masih ditemui. Beberapa diantaranya yaitu berkaitan

dengan yang pertama, pertentangan pendapat dari pihak di atas pemerintah desa yang terkadang menyebabkan keragu-raguan bagi Tim Pokja ProKlim untuk mengambil tindakan. Kedua, akses informasi yang harus melewati berlapis-lapis birokrasi dimana hal ini sangat memperlambat kinerja Tim Pokja ProKlim selaku komunikator yang bertugas memastikan ketersediaan informasi bagi masyarakat. Ketiga, adanya keterbatasan sumber daya seperti anggaran, personel, dan infrastruktur yang berdampak kepada proses komunikasi yang kurang maksimal.

B. Sumber Daya

Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan meliputi, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sumber daya alam, dan sumber daya finansial atau anggaran yang diperlukan untuk implementasi program. Berdasarkan dengan hasil penelitian di Desa Sambak dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia memegang peran kunci dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dimana sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja dari kebijakan.

Meskipun jumlah anggota Tim Pokja ProKlim sudah memadai, tetapi terdapat kendala terkait ketersediaan anggota masyarakat di setiap bidang koordinasi yang menjadi bagian dari tim. Ini dikarenakan banyak anggota masyarakat memiliki pekerjaan atau tengah mengejar pendidikan, sehingga keterbatasan waktu menjadi faktor

penghambat dalam partisipasi aktif mereka. Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan masyarakat juga memengaruhi pemahaman mereka terhadap kebijakan ProKlim.

Pentingnya pemilihan koordinator program dan Tim Pokja ProKlim yang kompeten dalam komunikasi menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi hambatan ini. Koordinator yang efektif dapat berperan dalam menyelaraskan upaya seluruh tim, memastikan pemahaman yang seragam, dan menjalankan komunikasi yang efisien dengan pihak eksternal. Di samping itu, pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan secara berulang sebelum pelaksanaan kegiatan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ProKlim dan membantu mereka berpartisipasi dengan lebih baik dalam pelaksanaan kebijakan

b) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan fondasi utama dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, yang merupakan tujuan inti dari ProKlim. Sumber daya alam seperti lahan pertanian, hutan, dan air memainkan peran krusial dalam strategi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Pengelolaan bijaksana dari sumber daya alam ini dapat mendukung praktik berkelanjutan yang mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan pangan.

Selain itu, sumber daya alam juga memberikan peluang ekonomi bagi komunitas lokal melalui sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di Desa Sambak memungkinkan berbagai inisiatif pengembangan ekonomi berbasis lokal, seperti program menuju Desa Wisata berbasis Zero Waste.

Pentingnya sumber daya alam dalam implementasi ProKlim menekankan perlunya menjaga dan mengembangkan potensi

sumber daya alam tersebut. Upaya pengembangan, seperti penanaman hutan, pengembangan kebun buah dan upaya pengadaan bibit buah melalui berbagai sumber pendanaan, menjadi langkah penting dalam mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

c) Sumber Daya Finansial

Aspek finansial atau anggaran merupakan aspek yang sangat sensitif dan harus diperhatikan secara cermat. Keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan lingkungan.

Berdasarkan kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim, Bab V Pembiayaan Pasal 18 disampaikan bahwa, biaya yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses dari pembentukan, pelaksanaan, pengembangan, dan penilaian ProKlim berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana ini digunakan untuk mendukung infrastruktur ramah lingkungan, pelatihan masyarakat, penelitian ilmiah, serta langkah-langkah mitigasi perubahan iklim seperti penggunaan energi terbarukan.

Keterlibatan sektor swasta, donatur, dan lembaga keuangan menjadi kunci dalam menyediakan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini dikarenakan anggaran yang diterima melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) semakin berkurang dari tahun ke tahun, sementara kebutuhan anggaran untuk berbagai bidang seperti kesehatan,

pembangunan, dan prioritas desa lainnya juga harus dipertimbangkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, secara umum implementasi Program Kampung Iklim di Desa Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang sudah cukup baik, namun masih perlu perbaikan pada beberapa faktor, yaitu :

1. Pembentukan Tim Pokja ProKlim Desa Sambak merupakan langkah yang strategis dalam mengatasi tantangan perubahan iklim. Akan tetapi di Desa Sambak sendiri peranan tim ini masih belum maksimal, dimana masih sering ditemui hambatan-hambatan seperti berkaitan dengan kemampuan anggota, ketersediaan waktu, dan pendanaan.
2. Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan program belum mencukupi kebutuhan pengembangan. Infrastruktur ramah lingkungan dan teknologi terkini mungkin dibutuhkan dalam beberapa program, seperti penggunaan energi terbarukan atau pengelolaan limbah. Sehingga, pemenuhan sarana prasarana yang memadai juga harus menjadi prioritas.
3. Permasalahan pendanaan dan ketersediaan sumber daya finansial menjadi kendala serius dalam mengembangkan program-program ProKlim.
4. Adanya kendala akses informasi yang harus melewati berlapis-lapis birokrasi dimana hal ini sangat memperlambat kinerja Tim Pokja ProKlim selaku komunikator yang bertugas memastikan ketersediaan informasi bagi masyarakat.
5. Adanya sumber daya alam yang melimpah di Desa Sambak, mulai dari kawasan hutan

Potorono yang mengelilingi desa, sumber mata air yang masih terjaga, dan tanah yang subur.

Berdasarkan kesimpulan yang dirumuskan oleh penulis, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Tim Pokja ProKlim dapat membentuk tim khusus yang bertanggung jawab mencari sumber dana tambahan dan mengelola anggaran dengan efisien.
2. Dilakukannya pengembangan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat Desa Sambak semakin beragam untuk mendorong keterampilan dan kemampuan masyarakat, serta sebagai media untuk menjalin komunikasi yang lebih erat dengan warga.
3. Peneliti berharap bahwa penelitian terkait Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Sambak, Kec. Kajoran, Kab. Magelang dapat terus berlanjut.

REFERENSI

- Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2006). Local capacity, village governance, and the political economy of rural development in Indonesia. *World development*, 34(11), 1958-1976.
- Dewi, H. K., & Sunarharum, T. M. (2022). Peningkatan Ketahanan Iklim di Kabupaten Magelang: Telaah Kerangka Kebijakan Smart Environment. *Jurnal Sinar Manajemen*, 9(2), 183-191.
- Furqan, M. H., Azis, D., & Wahyuni, R. (2020). Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 5(2).

- Hiwasaki, L., Luna, E., & Shaw, R. (2014). Process for integrating local and indigenous knowledge with science for hydro-meteorological disaster risk reduction and climate change adaptation in coastal and small island communities. *International journal of disaster risk reduction*, 10, 15-27.
- Hudaya, M. R., & Dewi, T. P. (2021). Collaborative governance dalam implementasi program kampung iklim di kelurahan talangbubuk, kecamatan plaju, kota Palembang. *KOMUNITAS*, 12(1), 1-10.
- Karima, F. (2022). Implementasi Strategi Komunikasi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat melalui Program Kampung Iklim di Kabupaten Magelang. *Jurnal Kirana*, 3(2), 117-128.
- Legionosuko, T., Madjid, M. A., Asmoro, N., & Samudro, E. G. (2019). Posisi dan strategi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim guna mendukung ketahanan nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 295-312.
- Perdinan, P., Atmaja, T., Adi, R. F., & Estiningtyas, W. (2018). Adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pangan: telaah inisiatif dan kebijakan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(1), 60-87.
- Puspito, A. I. (2016). Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Universitas Negeri Semarang*.
- Resosudarmo, I. A. P., Tacconi, L., Sloan, S., Hamdani, F. A. U., Alviya, I., & Muttaqin, M. Z. (2019). Indonesia's land reform: Implications for local livelihoods and climate change. *Forest policy and economics*, 108, 101903.
- Rinaldy, R., Nulhaqim, S. A., & Gutama, A. S. (2017). Proses community development pada program kampung iklim di desa cupang kecamatan gempol kabupaten Cirebon (studi kasus program bank sampah dalam program kampung iklim). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Rosaneni. (2020). Implementasi Program Unggulan Kampung Iklim di Kabupaten Bulukumba. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Suci, I. (2020). Analisis Implementasi Program Kampung Iklim untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Korong Pasa. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 1(1), 39-47.
- Keban T. Yeremias. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Simonis, Udo. (2008). Lester R. Brown, Plan B—Rescuing a Planet under Stress and a Civilization in Trouble. *The Environmentalist*. 28. 337-338.
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2012. Peraturan Tentang Program Kampung Iklim.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016. Program Kampung Iklim.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2011. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
- Pemerintah Desa Sambak. (2020). Peraturan Desa Sambak Nomor 188.4/9/KEP/2015/2020 Tentang Kelompok Kerja Program Kampung Iklim Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.
- Pemerintah Desa Sambak. Diakses melalui <https://www.sambak.desa.id/>